



# **Panduan Pembuatan Kebijakan (Perda Ramah Investasi)**



FORD FOUNDATION

# **Panduan Pembuatan Kebijakan (Perda Ramah Investasi)**

**KERJASAMA ANTARA:**

**FORD FOUNDATION**

dengan

**Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Jakarta 2013

# I. PENDAHULUAN

## I.1. Apakah Regulasi?

Menurut OECD, regulasi didefinisikan sebagai “berbagai kelompok instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan aturan-aturan tertentu kepada perusahaan dan warga negara. Regulasi mencakup undang-undang, keputusan dan peraturan tingkat-bawah yang dikeluarkan oleh semua tingkatan pemerintah, dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga *non-governmental* dan lembaga *self-regulatory* yang telah diberi kewenangan oleh pemerintah”. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa regulasi juga menggambarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah.

Pada prinsipnya, berdasarkan bidang yang diatur, regulasi dapat dikelompokkan dalam tiga kategori:

- Regulasi ekonomis mengatur kerangka bagi pelaku ekonomi, perusahaan, dan pasar (misalnya, persaingan usaha yang sehat dan pembatasan monopoli)
- Regulasi sosial merumuskan standar kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, dan mekanisme perwujudannya (misalnya, perlindungan lingkungan)
- Regulasi administratif berkenaan dengan formalitas dan administrasi pemerintah, atau sering disebut ‘red tape’ (misalnya, berbagai lisensi)

## I.2. Ledakan Regulasi dalam Masa Otonomi Daerah

Setelah diterapkannya UU Otonomi Daerah pada 1999 yang menjadi tonggak dimulainya otonomi daerah, Kab./Kota mendapatkan kewenangan lebih luas dalam menerbitkan regulasi. Umumnya regulasi tersebut berbentuk peraturan, khususnya di daerah. Hal ini dilandasi oleh pengaturan mengenai pembentukan peraturan daerah bagi kelangsungan otonomi di daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Meskipun kemudian dalam tata urutan peraturan perundang-undangan kedudukan perda berada di bawah peraturan ditingkat nasional, namun perda tetap menjadi roh dari otonomi daerah

Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengadministrasikan perdagangan dan industri, dan karenanya daerah berhak untuk mengenakan regulasi terkait perdagangan dan industri seperti perijinan usaha maupun pungutan. Namun, seringkali perda yang dibuat justru tidak bertujuan untuk memecahkan masalah dan seringkali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil studi TKED 2011 menunjukkan bahwa sekitar 72% perda memiliki kebermasalahan dalam kemutakhiran (*Up-to-Date*) acuan yuridis. Lebih jauh lagi, terkadang peraturan daerah yang dibuat tidak aspiratif dan partisipatif, serta substansinya sering membebani masyarakat khususnya dunia usaha. Hal ini tidak terlepas dari Penyusunan Ranperda yang tidak didasari oleh perencanaan yang jelas, terpadu dan sistematis, serta sering kali tidak terkait dengan RPJPD, RPJMD/Renstra SKPD. Apalagi terkait dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional.

Permasalahan lainnya yang muncul adalah, pembentukan peraturan daerah tidak didukung dengan kompetensi dari pembuat kebijakan (*legal drafter*) dan atau minimnya jumlah ahli perancangan peraturan perundangan yang memahami substansi masalah secara komprehensif. Dengan minimnya kompetensi pembuat kebijakan, peraturan yang dibuat bukan merupakan pemecah masalah, bahkan seringkali menimbulkan masalah yang baru.

### **I.3. Beban Regulasi terhadap Dunia Usaha**

Dengan adanya ledakan regulasi tersebut, terdapat banyak regulasi yang kemudian membebani dunia usaha. Beban yang ditanggung oleh dunia usaha diantaranya adalah inefisiensi biaya dan juga adanya ketidakpastian hukum. Bentuk regulasi yang menimbulkan beban antara lain peraturan yang terkait pungutan (pajak dan retribusi). Selain peraturan yang terkait pungutan, peraturan yang mengatur tentang perijinan juga dapat menimbulkan beban, jika peraturan yang ditetapkan justru menambah prosedur, waktu dan biaya pengurusan ijin.

### **I.4. Deregulasi untuk Meningkatkan Kompetisi**

Globalisasi ekonomi membuat deregulasi menjadi penting, karena dengan penetapan regulasi yang tepat akan membawa efisiensi. Deregulasi adalah pengurangan atau penghapusan regulasi-regulasi yang dapat menimbulkan beban bagi masyarakat khususnya dunia usaha. Deregulasi, dalam rangka menghapuskan penyebab utama ekonomi biaya tinggi di Indonesia, merupakan salah satu mekanisme yang dapat membantu kalangan usaha Indonesia untuk menjadi kompetitif secara internasional. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif:

1. Indonesia tidak memiliki undang-undang yang mengatur prosedur bagi dunia usaha yang dapat diterapkan secara umum; setiap lembaga memiliki prosedur tersendiri. Hal ini menjadi masalah karena tidak terdapat standar perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh suatu regulasi agar dianggap sah.
2. Belum ada asesmen terhadap dampak regulasi sehingga terkadang regulasi pemerintah yang dikeluarkan tidak menjawab masalah.

## **II. PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)**

### **II.1. Apa itu Prolegda?**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa “Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis”. Sebelum membuat satu peraturan, diperlukan sebuah perencanaan yang merupakan bagian dari manajemen pembentukan peraturan. Perencanaan ini memiliki arti strategis dalam menyusun kebutuhan substansi serta skala prioritas regulasi daerah yang sejalan dengan RPJMD dan RPJPD. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan suatu produk kebijakan. Tanpa ada perencanaan yang baik akan timbul komplikasi

dari penerapan suatu aturan sehingga peraturan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Di tingkat daerah, proses perencanaan ini tertuang dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

## II.2. Apa Fungsi Prolegda?

Beberapa fungsi dari Prolegda adalah:

- Memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Peraturan Daerah;
- Menetapkan skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk jangka panjang, menengah atau jangka pendek sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah;
- Menyelenggarakan sinergi antar lembaga/ institusi/ SKPD/ yang berwenang membentuk Peraturan Daerah;
- Mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menurut skala prioritas yang ditetapkan;
- Menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Daerah.

## II.3. Apa Tujuan Prolegda

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Prolegda adalah:

- memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum Peraturan Daerah yang akan dibentuk.
- menyusun skala prioritas sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu dengan RPJP, RPJM, RPJPD, dan RPJPD
- membangun konsistensi yang sinergis dengan peraturan yang lebih tinggi.

## II.4. Prinsip: “Tidak ada Perda di luar Prolegda”

Prinsip prolegda adalah tidak ada perda diluar prolegda. Ini berarti bahwa seluruh perda yang akan dibuat haruslah berdasarkan prolegda yang telah diajukan. Sehingga tidak boleh seorang kepala daerah mengajukan rancangan Perda di luar prolegda kecuali ada keadaan tertentu yang mengharuskan Kepala Daerah ataupun DPRD mengajukan Perda diluar itu. Hal ini berdasarkan Ps 81 ayat (3) dan (4) PP No 16/2010.

Perlu diingat bahwa Prolegda bukan sekedar daftar judul Perda karena secara substantif Prolegda harus mampu mencerminkan visi, misi dan arah kebijakan yang hendak dicapai sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan nasional. Beberapa substansi Prolegda dapat dilihat dibawah ini:

### Substansi Prolegda

1. Latar belakang masalah dan tujuan penyusunannya, termasuk keterkaitan dengan perundang-undangan lainnya (vertikal/horizontal).
2. Sasaran yang akan diwujudkan oleh pembuatan perda (Panjang, menengah, pendek)
3. Pokok-pokok pikiran dan lingkup yang akan diatur
4. Jangkauan arah pengaturan (siapa yang akan terpengaruh dan mempengaruhi dengan adanya aturan)

## II.5. Prolegda, Naskah Akademik dan Regulatory Impact Assessment (RIA)

Untuk mendukung tercapainya sebuah Prolegda dengan substansi yang baik, maka diperlukan sebuah naskah akademik. Pada Pasal 33 UU No.12 Tahun 2012, yang menjadi dasar hukum dari keberadaan naskah akademik, disebutkan bahwa penyusunan naskah akademik yang baik adalah melalui kajian. Melalui kajian diharapkan akan mampu menjawab sejumlah pertanyaan seputar apa materi pokok yang harus diatur, bagaimana keterkaitan dengan regulasi (vertikal – horizontal), siapa unit terkait yang terlibat, dan target waktu/prioritasnya. Naskah akademik yang dihasilkan pun nantinya adalah menjabarkan poin-poin dari prolegda. Jabaran ini yang nantinya tercermin dalam pasal-pasal di sebuah perda. Beberapa hal yang mendasari pentingnya naskah akademik menjadi dasar bagi pembentukan Perda adalah:

Panduan pertanyaan dalam membantu proses penyusunan Naskah Akademik diantaranya sebagai berikut:

- Bagaimana Cara Menentukan Materi Pokok?
- Bagaimana menentukan status peraturan (baru atau revisi)?
- Bagaimana menentukan keterkaitan antar regulasi (vertikal-horizontal)
- Bagaimana cara menentukan unit terkait yang terlibat?
- Bagaimana cara menentukan target waktu/prioritas?

Guna menjawab sejumlah permasalahan tersebut, dalam penyusunan prolegda bisa menggunakan metode/tahapan kerja RIA (*Regulatory Impact Assessment*). Dalam praktiknya RIA dapat digunakan dalam penyusunan keseluruhan kebijakan termasuk prolegda. Dari keseluruhan kelompok tahapan RIA, prolegda masuk dalam kelompok Pre-RIA. Meskipun baru Pre-RIA/ penyusunan perencanaan /Prolegda, tahap konsultasi publik sudah harus dilakukan dan menjadi bagian yang cukup penting.

Meskipun Pre-RIA merupakan unsur penting dalam penyusunan Prolegda, namun dalam implementasinya di daerah memiliki tantangannya tersendiri. Diantaranya terkait dengan pembiayaan dalam penyelenggaraan RIA. Meski demikian, terobosan dengan menggunakan dasar hukum UU No. 12 Tahun 2004 utamanya pasal 33. Dengan dukungan politik yang cukup rasanya pembiayaan RIA dalam proses penyusunan prolegda dapat dianggarkan.

Setelah melalui sejumlah proses tahapan, termasuk tahapan RIA, dalam perumusan prolegda oleh pemerintah daerah dapat dilanjutkan dengan melakukan pengisian form sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2011 (lihat tabel di bawah).

No	Jenis	Tentang (Judul)	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian (Tahun)	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan Tabel:

1. Nomor urut pengisian.
2. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
3. Penamaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Materi muatan pokok yang akan diatur.
5. Peraturan tersebut baru.
6. Peraturan tersebut hanya perubahan.
7. Peraturan tersebut merupakan delegasi/ perintah dan peraturan yang lebih tinggi.
8. Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan peraturan yang disusun
9. Tahun penyelesaian kapan? .
10. Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

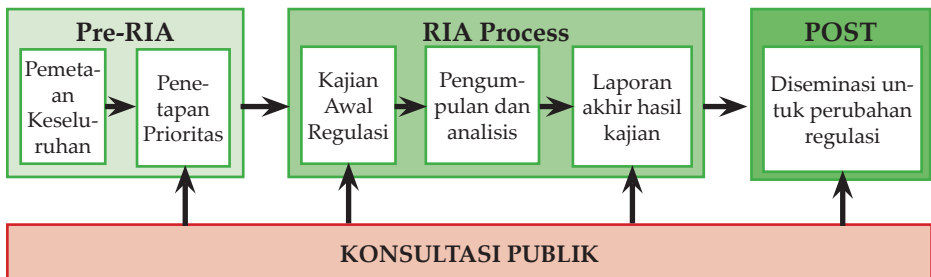
### III. REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA)

Seperti telah disebutkan diatas, untuk menghasilkan suatu regulasi yang baik, maka diperlukan naskah akademik yang dapat mendukung hal tersebut. Agar naskah akademik yang dihasilkan berkualitas, dapat digunakan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA).

#### III.1. Apa yang dimaksud dengan RIA?

*Regulatory Impact Assessment* (RIA) adalah sebuah metodologi untuk meningkatkan mutu peraturan yang sudah ada dan peraturan baru. Metodologi tersebut memberikan peluang bagi pengguna untuk memeriksa apakah peraturan sudah sesuai dengan kriteria mutu yang dijabarkan dalam *checklist* yang dikembangkan dan direkomendasikan oleh OECD (1995). Melalui RIA akan ditinjau peraturan yang ada dan mengubah prosedur yang birokratif menjadi prosedur yang smart dengan merumuskan peraturan yang lebih baik sehingga dapat menjadi daya tarik dalam hal investasi bagi sebuah daerah.

#### III.2. Seperti apa tahapan RIA?



Ada tiga tahapan proses RIA, yaitu: Pre RIA, RIA Process, Post RIA. Untuk Pre RIA, kegiatan yang termasuk didalamnya adalah pemetaan keseluruhan regulasi yang telah ada dan penetapan prioritas kajian. Pemetaan keseluruhan regulasi yang telah ada ini

dilakukan agar di dapat gambaran besar mengenai peraturan perundangan yang sudah ada untuk hal yang akan di regulasikan. Dengan adanya gambaran besar dari peraturan yang sudah ada, maka dapat ditentukan seperti apa regulasi yang akan dibuat termasuk skala dan jenis regulasinya.

Setelah tahapan Pre RIA, maka dilakukan proses RIA. Proses RIA sendiri, terdiri dari 7 tahapan yang terdiri dari:

1. Perumusan masalah atau issue yang menimbulkan kebutuhan untuk menerbitkan suatu kebijakan (melakukan tindakan);
2. Identifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan kebijakan tersebut;  
2a. Penilaian risiko (*Risk Assessment*)
3. Identifikasi berbagai alternatif tindakan (opsi) untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut;
4. Assessment atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) untuk setiap opsi, dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, konsumen, dan ekonomi secara keseluruhan;
5. Konsultasi & komunikasi dengan stakeholders, dalam semua tahapan tersebut di atas;
6. Penentuan opsi terbaik (yang dipilih);
7. Perumusan strategi untuk menerapkan dan merevisi kebijakan.

### III.3. Apa manfaat RIA?

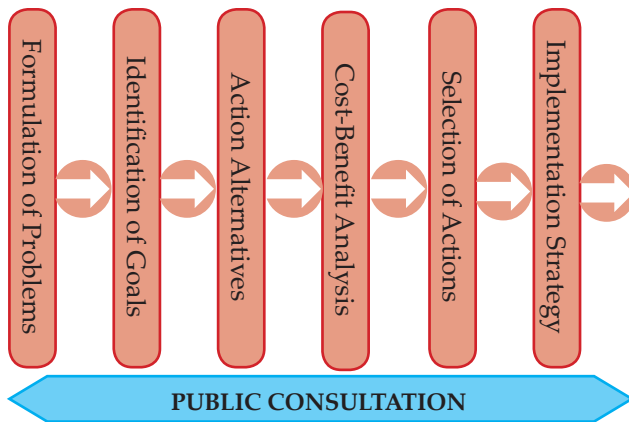
Terdapat beberapa manfaat dalam membentuk kebijakan dengan menggunakan metode RIA, yaitu:

- RIA memberi para pembuat keputusan kemampuan untuk menimbang untung-rugi yang harus diseimbangkan di setiap tindakan terkait dengan penerbitan peraturan;
- RIA menghubungkan peraturan bermutu tinggi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pembangunan ekonomi;
- RIA menyediakan data empiris untuk membuat keputusan peraturan yang tepat;
- RIA menyediakan pedoman yang jelas untuk berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan dan akuntabilitas publik;
- Temuan RIA terkait dengan solusi berbiaya terendah membantu mengurangi biaya pelaksanaan bagi pemerintah serta biaya transaksi bagi usaha.

### III.4. Apa Saja Tahapan-Tahapan Pelaksanaan RIA?

Terdapat tujuh langkah dalam melakukan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) baik dalam membuat kebijakan maupun dalam melakukan tinjauan kebijakan. Tahapan pelaksanaan tersebut adalah:



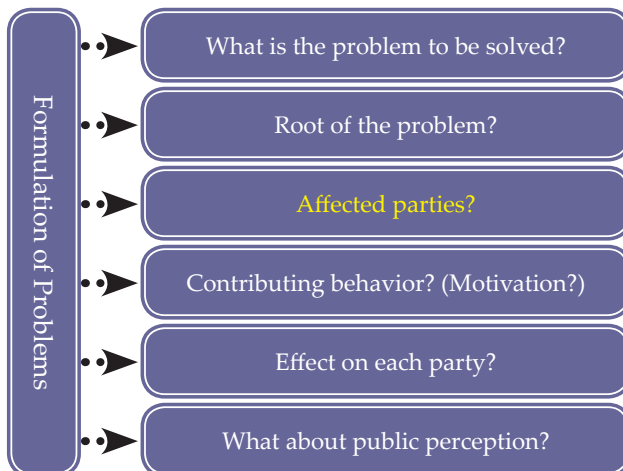


### III.4.1. Bagaimana Mengidentifikasi permasalahan?

- Di tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan yang akan dipecahkan melalui sebuah kebijakan
- Perlu dibedakan antara Masalah Utama vs Gejala

**Perhatikan:** Masalah sebagai perbedaan (*gap*) antara situasi yang terjadi (*actual*) dengan situasi yang diinginkan (*desired*). Perumusan masalah dalam *review* kebijakan mencakup penentuan '*gap*' tersebut dengan tepat, dan mengidentifikasi 'penyebab' masalah, yakni hal-hal yang menimbulkan terjadinya perbedaan antara situasi yang *actual* dan *desired*.

Untuk mempermudah merumuskan masalah, terdapat beberapa pertanyaan kunci seperti diagram dibawah ini:



### Selalu Ingat akan 2 hal:

- Peraturan (kebijakan) dibuat untuk mengatasi suatu masalah.
- Seringkali masalah yang teridentifikasi hanya merupakan gejala, bukan akar permasalahan.

Beberapa hal yang juga harus diidentifikasi ketika melakukan perumusan masalah adalah:

- a. Siapakah pihak yang terpengaruh?
  - Identifikasi pihak yang terpengaruh termasuk jumlah (populasi) dan berapa besar pengaruh tersebut.
- b. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap masalah?
  - Perumusan masalah yang baik harus memperhatikan persepsi dari berbagai pihak (*stakeholders*).
  - Dengan melihat persepsi berbagai *stakeholders*, ada beberapa manfaat:
    - a. Memastikan bahwa masalah tersebut memang benar-benar ada (*real*) dan bukan hanya sekedar 'persepsi' (*anggapan*) terhadap satu masalah.
    - b. Menentukan tingkat keseriusan masalah yang ada, khususnya dari sudut pandang *stakeholder*.

### Harus selalu ingat untuk tidak mengarahkan pada 'metode' untuk mengatasi masalah

- Tidak boleh mengarahkan atau menekankan pada metode untuk mengatasi masalah, seperti mengarahkan bahwa suatu masalah hanya bisa dipecahkan melalui penerbitan regulasi.

#### CONTOH KASUS IDENTIFIKASI PERMASALAHAN:

Beberapa permasalahan komoditas kakao yang tergal dari konsultasi para stakeholder kakao di Majene yaitu sebagai berikut:

- a. Serangan hama dan penyakit
- b. Sarana produksi masih kurang
- c. Motivasi petani merawat kebun rendah
- d. Pemasaran kakao bersifat individu
- e. Kurangnya modal usaha bertani kakao

Didalam konsultasi dengan para stakeholder tersebut, disimpulkan bahwa permasalahan tersebut terjadi karena **rendahnya kapasitas petani dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap maupun modal**. Beberapa pihak yang berpengaruh terhadap akar masalah ini adalah Penyuluh, Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD), Pemerintah Daerah, Perbankan, Kelompok Tani dan pihak Swasta.

#### PENGARUH TERHADAP PETANI KAKAO

Rendahnya kapasitas SDM petani akhirnya berpengaruh pada:

- a. Rendahnya produktivitas
- b. Rendahnya pendapatan dan kesejahteraan petani

### III.4.2. Bagaimana Mengidentifikasi Tujuan Kebijakan?

Tujuan kebijakan dilakukan untuk mengetahui sasaran yang ingin dicapai melalui penerbitan suatu kebijakan. Suatu kebijakan memang untuk memecahkan masalah, namun jika masalah yang terjadi cukup pelik dan rumit, maka dalam keadaan demikian, kebijakan pemerintah biasanya dibuat memang hanya ditujukan untuk mengatasi sebagian dari masalah yang dihadapi. Selain itu, juga perlu dilihat apakah pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan tersebut dan apakah kebijakan tersebut konsisten dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

Ada beberapa pertanyaan yang menjadi acuan untuk mengidentifikasi tujuan kebijakan yang akan diterapkan yaitu:



**a. Apakah perlu intervensi pemerintah?**

Harus ada alasan yang tepat untuk melakukan intervensi melalui penerbitan regulasi (justifikasi atas intervensi pemerintah memang diperlukan dan tepat).

**b. Bagian masalah yang ingin diselesaikan**

Identifikasi dengan jelas bagian mana dari masalah tersebut yang menjadi 'sasaran' regulasi yang akan diterbitkan.

**c. Tujuan (sasaran) yang diinginkan**

Setelah menetapkan bagian masalah yang akan diselesaikan, maka penentuan sasaran (tujuan) kebijakan menjadi lebih mudah. Tujuan kebijakan tentu saja adalah memperbaiki kondisi yang bermasalah.

**d. Identifikasi pelaku utama (*key players*)**

Identifikasi terlebih dahulu individu (*key player*) yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Siapakah mereka? Apa kepentingan mereka dalam hal ini? Bagaimana mereka berperilaku? Semakin banyak informasi yang didapat, maka semakin besar

pula peluang untuk menyusun suatu kebijakan yang sukses. Biasanya, terhadap sekelompok orang yang berbeda mungkin diperlukan kebijakan (alternatif/solusi) yang berbeda.

**e. Perilaku yang dikehendaki**

Pada tahap ini, harus diterjemahkan tujuan kebijakan kedalam perubahan perilaku yang diinginkan. Selain itu, perlu juga ditetapkan seberapa besar perubahan perilaku yang diinginkan. Pertanyaan ini mendorong pembuat kebijakan untuk melihat realitas sehingga target perubahan perilaku dapat dicapai.

**CONTOH IDENTIFIKASI TUJUAN KEBIJAKAN:**

Akar masalah dari beberapa permasalahan komoditas kakao di majene adalah rendahnya kapasitas petani dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap maupun modal. Untuk meningkatkan kapasitas petani, maka diperlukan intervensi pemerintah baik dalam bentuk regulasi maupun non regulasi yang menasar pada dua aktor komoditas kakao yaitu petani dan penyuluh. Dari kebijakan yang ditetapkan, diharapkan terjadi perubahan perilaku petani dan penyuluh seperti dibawah ini:

- a. Petani, diharapkan dengan meningkatkan kapasitas petani, maka terjadi beberapa perubahan perilaku seperti:
  1. Merawat kebun sesuai dengan anjuran teknis budidaya kakao yang baik
  2. Melaksanakan penguatan fungsi organisasi kelompok tani
  3. Melakukan pemasaran bersama dengan petani lain melalui poktan/UPH
  4. Membuka akses kemitraan dengan pihak lain (swasta, perusahaan, LSM, perbankan)
  5. Melakukan akses informasi atau komunikasi (pemda, perbankan)
  6. Kemandirian permodalan (tidak bergantung pada tengkulak, pedagang pengepul)
- b. Penyuluh, perubahan perilaku yang diharapkan seperti:
  1. Melakukan kegiatan penyuluhan secara intensif
  2. Pengetahuan teknis kakao penyuluh memadai

**III.4.3. Bagaimanakah mengidentifikasi Alternatif Tindakan/Penyelesaian?**

Setelah tujuan kebijakan diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi alternatif tindakan/penyelesaian. Tujuan utama tahap ini adalah untuk menghasilkan suatu daftar (*list*) mengenai berbagai metode atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Tahap ini bukan dimaksudkan untuk menentukan metode (tindakan) manakah yang harus dipilih. Sebelum menentukan alternatif-alternatif tindakan, maka ada beberapa pertanyaan yang bisa dijadikan landasan untuk mengembangkan alternatif tindakan tersebut, yaitu:

- Pilihan-pilihan apa saja yang ada untuk menyelesaikan masalah?
- Apakah tindakan Pemerintah benar-benar diperlukan atau ada cara lain untuk menyelesaikan masalah?

- Apabila peraturan diperlukan, apa saja model pilihannya? Membuat baru atau merevisi atau *do nothing*? Peraturan level nasional atau lokal?

***Pada dasarnya RIA membuka pandangan untuk mengidentifikasi berbagai alternatif penyelesaian masalah.***

Dalam mengidentifikasi alternatif, kita mempertimbangkan apakah terdapat alternatif tindakan selain peraturan (*non-regulatory; alternatif to regulation*) yang dapat menyelesaikan masalah yang dituju. Yang dimaksud dengan *alternative non* peraturan adalah *alternative* tindakan yang tidak memerlukan kerangka peraturan perundang-undangan seperti UU, PP, dan Perda. Selain itu, jika masalah tersebut akan diselesaikan melalui peraturan, kita juga masih harus mempertimbangkan bentuk peraturan seperti apakah yang dapat diterapkan (*alternatif forms of regulation*).

Beberapa jenis alternatif non peraturan adalah seperti dibawah ini

### **Pengeluaran pemerintah (termasuk subsidi)**

Pemerintah meningkatkan pengeluaran (belanja) pemerintah ini melalui hibah, subsidi, ganti rugi, atau pembelian barang tertentu.

#### **1. Pinjaman dan penjaminan pinjaman**

Pemerintah memberikan insentif keuangan melalui pemberian pinjaman dengan syarat-syarat kredit yang mengarahkan pada perubahan perilaku sesuai yang diinginkannya. Pemerintah juga dapat bertindak sebagai penjamin pinjaman.

#### **2. Tarif (*user charges*)**

*User charges* adalah *fee* yang dikenakan terhadap orang (fihak) yang menggunakan atau mengkonsumsi produk, jasa, atau fasilitas kolektif.

#### **3. Kepemilikan oleh Negara**

Pemerintah dapat mengambil alih kepemilikan perusahaan pada industri yang 'sensitif' untuk mencapai sasaran kebijakan publik, contohnya kepemilikan Negara pada PLN.

#### **4. Persuasi**

Dalam persuasi, pemerintah tidak membuat aturan yang mewajibkan perilaku tertentu, akan tetapi mendorong dilakukannya perilaku tersebut secara sukarela. Dalam persuasi pemerintah berusaha memastikan agar para pelaku memahami alasan mengapa perilaku tersebut diperlukan. Dalam regulasi, pelaku menjalankan perilaku tertentu karena takut terhadap sanksi yang akan dikenakan oleh pemerintah. Sedangkan dalam persuasi, perilaku tertentu dilakukan karena pelaku memahami alasannya.

#### **5. Asuransi**

Pemerintah dapat membuat atau mendorong skim asuransi untuk melindungi kepentingan pihak tertentu (misalnya konsumen) dari sesuatu risiko.

Beberapa contoh alternatif non regulasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Instrumen	Contoh
Pengeluaran pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membeli komoditas tertentu untuk menjaga kestabilan harga</li> </ul>

Instrumen	Contoh
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hibah untuk menutup biaya yang timbul karena menanam varietas padi baru</li> <li>Subsidi untuk membeli peralatan untuk mengurangi polusi</li> </ul>
Pinjaman & penjaminan pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penjaminan pinjaman untuk menutup biaya riset dan pengembangan atas teknologi atau produk baru</li> <li>Pinjaman untuk membantu biaya pelatihan dan pendidikan pekerja</li> </ul>
User charges	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fee atas pembuangan limbah (sesuai dengan jumlah yang dibuang)</li> <li>Fee atas konsumsi air minum</li> </ul>
Kepemilikan pemerintah	BUMN
Persuasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong kode etik bagi asosiasi waralaba</li> <li>Program kesadaran lingkungan hidup</li> <li>Promosi penggunaan produksi dalam negeri</li> </ul>
Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asuransi atas kompensasi pekerja</li> <li>Asuransi liability bagi professional</li> </ul>

### *Pertimbangan dalam memilih (screening) alternatif*

Dalam *screening* ini kita menghilangkan alternatif yang secara jelas 'layak untuk dieliminir', dan memilih beberapa alternatif yang superior untuk dievaluasi lebih lanjut. Pertimbangan yang sering digunakan dalam *screening* alternatif adalah:

- Legalitas:** apakah pemerintah berhak secara legal untuk melakukan tindakan tersebut? legalitas ini mencakup legal menurut hukum domestik maupun internasional (misalnya perjanjian WTO).
- Biaya (costs):** berapa besar biaya yang harus dikeluarkan (terjadi) untuk melakukan tindakan tersebut? biaya ini mencakup biaya & kerugian yang ditanggung oleh pemerintah, konsumen, pelaku bisnis, dan UKM.
- Dampak terhadap masyarakat:** menyangkut seberapa besar pengaruh dari tindakan tersebut terhadap masyarakat. Pertimbangan dampak antara lain mencakup:
  - fairness & access for the poor:* apakah masyarakat melihat tindakan tersebut cukup adil dan tidak menghalangi akses kaum miskin terhadap fasilitas dasar;
  - intrusiveness:* apakah regulasi terlalu mengganggu kegiatan masyarakat? (campur tangan pemerintah terlalu besar)
  - faktor kesehatan, safety, dan lingkungan hidup:* apakah tindakan tersebut terkait kesehatan, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan hidup
  - lingkup:* apakah mempengaruhi sedikit atau banyak orang (penyebaran dampak);
- Visibilitas dan kemungkinan mencapai sasaran:** mengukur seberapa jauh tindakan tersebut dapat membantu pemerintah mencapai tujuan kebijakan.
- Hambatan terhadap persaingan usaha yang sehat:** mengukur seberapa besar alternatif tersebut mempengaruhi (menghambat) persaingan usaha.

Pada akhir proses *screening*, analis akan membuat kesimpulan alternatif manakah yang layak untuk di analisis lebih lanjut. Evaluasi dilakukan melalui dua cara yaitu kualitatif dan kuantitatif (*scoring*) untuk menunjukkan kesimpulan akhir dari evaluasi berdasarkan berbagai kriteria tersebut.

**CONTOH IDENTIFIKASI ALTERNATIF KEBIJAKAN:**

Untuk mencapai tujuan kebijakan, dilakukan identifikasi terhadap alternative intervensi yang mungkin dilakukan, baik berupa regulasi maupun non regulasi seperti dalam tabel dibawah ini:

Identifikasi Alternatif Kebijakan	
Regulasi	Non Regulasi
Revisi Perda SOTK	Alokasi anggaran untuk pelatihan penyuluh
Perda tentang Kelembagaan Kelompok Tani Kakao	Penguatan kelembagaan KPPK
SK Bupati tentang Distribusi Pupuk	Penguatan koordinasi antar SKPD untuk program peningkatan kapasitas petani
	Peningkatan jumlah penyuluh dan perbaikan sistem rekrutmen penyuluh
	Bantuan modal melalui KTNA

Dari keseluruhan alternatif tersebut, kemudian dilakukan *screening* terhadap alternatif-alternatif yang relevan dan untuk di analisis lebih lanjut. Alternatif-alternatif yang relevan tersebut adalah:

1. **Revisi Perda SOTK Mejene untuk membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang sesuai dengan nomenklatur yang dikehendaki dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.**
2. **Membentuk Perda tentang kelembagaan kelompok tani sebagai pelaksanaan dari permentan No.273/KPTS/2009 dan UU No.16 Tahun 2006.**
3. **Program peningkatan kapasitas penyuluh**

**III.4.4. Apa Pentingnya Analisis Biaya Manfaat?**

Analisis Biaya Manfaat penting karena menjadi dasar utama pemilihan alternatif dan alat untuk mengklarifikasi apakah identifikasi masalah dan tujuan penerapan regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya sudah tepat.

**III.4.4.1. Bagaimana Melakukan Analisis Manfaat?**

Manfaat dari suatu alternatif yang akan diusulkan, digambarkan dalam bentuk pengurangan atau hilangnya suatu masalah yang menjadi dasar dirumuskannya alternatif tersebut. Manfaat juga terkadang muncul secara tidak langsung. Jumlah jenis

manfaat masing-masing alternatif regulasi yang sedang dipertimbangkan mungkin berbeda dan setiap alternatif mungkin menghasilkan manfaat yang berganda. Oleh karena itu, ketika mengidentifikasi manfaat, harus dengan mengidentifikasi seluruh manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari setiap alternatif regulasi yang sedang dipertimbangkan.

Ada dua kemungkinan masalah yang muncul pada saat memperkirakan manfaat:

1. Sulit untuk menemukan data yang dikehendaki, khususnya pada manfaat yang tidak dapat di kuantifisir. Solusi terhadap masalah ini adalah memanfaatkan semaksimal mungkin data yang tersedia. Jika tidak tersedia data yang secara langsung mengukur manfaat, cari data yang dapat menjadi substitusi atau proksi terhadap manfaat yang ingin diketahui.
2. Masalah kedua muncul ketika harus dilakukan penilaian kualitatif yang bersifat normatif (*value judgments*).

Langkah-langkah dalam melakukan analisa manfaat adalah:

➤ **Langkah 1: Mengidentifikasi manfaat**

Dari setiap alternatif yang dipilih, dilakukan identifikasi manfaat yang didapat oleh setiap *stakeholder*. Manfaat disini adalah konsekuensi tindakan yang membuat orang atau kelompok lebih baik. Hal penting untuk diingat dalam mengidentifikasi manfaat adalah bahwa hampir semua regulasi dimaksudkan untuk melakukan perubahan.

➤ **Langkah 2: Menetapkan siapa yang mendapat manfaat**

Menetapkan kelompok, organisasi dan individual yang akan menerima masing-masing manfaat yang telah diidentifikasi pada Langkah 1. Beberapa contoh kelompok yang mendapatkan manfaat dari penetapan kebijakan penguatan kelembagaan petani kakao adalah:

- a. Petani kakao → Mendapatkan manfaat jika perda kelompok tani ditetapkan.
- b. Kelompok tani kakao → Kelompok tani
- c. Penyuluh → Menjadi lebih mudah dalam memberikan penyuluhan, karena kelompok tani menjadi lebih mudah teridentifikasi.

Ada beberapa langkah dalam menentukan siapa yang mendapat manfaat dari masing-masing alternatif, yaitu:

- a. Tentukan berapa jumlah (populasi) masing-masing kelompok penerima manfaat  
→ Lakukan identifikasi kelompok penerima manfaat baik dari masyarakat umum, dunia usaha dan juga Pemerintah  
Catatan: Jika kelompok yang akan memperoleh manfaat tidak dapat diidentifikasi, kemungkinan regulasi yang direncanakan masih bersifat *premature* → kumpulkan informasi sebanyak mungkin  
→ *Review* data untuk memperkirakan jumlah orang atau pihak yang akan menerima manfaat
- b. Perhatikan *beneficiaries* (penerima manfaat langsung & tidak langsung)  
→ Klasifikasikan penerima manfaat kedalam dua kategori: penerima manfaat langsung dan manfaat tidak langsung.
- c. Konfirmasi daftar manfaat kepada para penerima manfaat  
→ Konfirmasikan ulang daftar penerima manfaat tersebut.



### Alasan :

1. Jika disetujui oleh masing-masing pihak, maka daftar manfaat akan lebih meyakinkan dan pihak-pihak yang belum dimasukkan dapat diidentifikasi dan dimasukkan sebagai pihak penerima manfaat.
2. Jika pihak penerima tidak yakin dengan daftar penerima tersebut, maka daftar tersebut harus dipertimbangkan lagi. Jika kelompok penerima tidak dapat diyakinkan bahwa mereka menerima manfaat, alternatif regulasi yang direncanakan tidak diperlukan lagi.

### ➤ **Langkah 3: Menentukan indikator untuk mengukur setiap manfaat**

Agar manfaat dapat diukur, maka ditentukan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menilai besaran manfaat tersebut. Untuk menentukan indikator terdapat beberapa langkah yaitu:

#### **a. Tetapkan indikator untuk masing-masing manfaat**

- ➔ Tetapkan indikator untuk masing-masing manfaat yg telah diidentifikasi. Indikator harus menggambarkan besar manfaat.

Catatan: Perkiraan dalam bentuk angka akan membantu pengambil keputusan dalam menilai apakah alternatif tersebut layak atau tidak. Selain itu, indikator akan berguna kelak ketika dilakukan evaluasi mengenai efektivitas regulasi tersebut, seandainya regulasi tersebut jadi diterapkan.

#### **b. Fokus pada indikator yang mewakili manfaat (*measurable outcomes*)**

Beberapa hal yang harus dilakukan pada tahap ini adalah:

- ➔ mengidentifikasi data atau indikator apa yang akan di gunakan untuk menunjukkan manfaat yang telah diidentifikasi
- ➔ Pusatkan perhatian lebih untuk menemukan angka yang dapat mewakili manfaat yang diidentifikasi pada Langkah 1 (identifikasi manfaat)

Catatan: Mungkin akan ditemukan bahwa nilai suatu indikator tergantung pada beberapa hal. Jika ini terjadi, anda mungkin harus melakukan beberapa pekerjaan untuk menghasilkan perkiraan manfaat, contohnya upaya Pemda Majene untuk melestarikan pertanian kakao di Majene, maka indicator yang dapat dipakai adalah tingkat produktivitas kakao. Untuk dapat memperkirakan nilai indikator ini, maka perlu dikumpulkan informasi tentang jumlah pohon kakao saat ini, klasifikasi umur pohon kakao, dsb.

#### **c. Gunakan indikator *proksi* utk manfaat yang sulit diukur**

- ➔ Indikator *proksi* digunakan jika informasi untuk indikator ideal tidak diperoleh. *Proksi* ini adalah indikator yang memberikan indikasi tentang angka yang dikehendaki karena kedua indikator berkorelasi erat.

Catatan: Mungkin mustahil untuk memperkirakan besarnya manfaat program kali bersih, tetapi mungkin dapat diperoleh data penurunan pasien yang datang ke puskesmas sekitar daerah aliran sungai dengan keluhan penyakit yang berkaitan erat dengan tercemarnya air sungai. Melakukan perkiraan dengan data ini mungkin tidak sempurna, tetapi menggunakannya akan jauh lebih baik daripada tidak menggunakan data sama sekali

**\*\* Jika tetap sulit juga, gunakan data kualitatif, dan dibuatkan catatan pada bagian akhir laporan**

- **Langkah 4: Mengukur *baseline* dari setiap indikator (tanpa tindakan)**
  - ➔ Di tahap ini, seharusnya sudah ditetapkan indikator-indikator apa yang akan digunakan untuk mengukur manfaat yang sudah diidentifikasi pada Langkah 1
  - ➔ Bandingkan perkiraan nilai masing-masing indikator dengan dan tanpa regulasi. (nilai manfaat = nilai manfaat yang diperoleh setelah regulasi diterapkan - nilai manfaat pada saat regulasi belum diterapkan)
  - ➔ Jika pemerintah tidak melakukan tindakan apa-apa, maka nilai indikator yang digunakan akan sama dengan nilai indikator tersebut pada saat ini.
  - ➔ Dalam rangka untuk mengisolasi pengaruh yang diperkirakan untuk masing-masing alternatif, harus diperkirakan nilai indikator yang digunakan dengan dan tanpa masing-masing alternatif tersebut

**Contoh:**

Di Majene, untuk mengukur peningkatan produktivitas, diperlukan satu titik waktu untuk memulai pengukuran peningkatan. Data yang diambil dari satu titik waktu ini lah yang kemudian menjadi data dasar untuk menghitung peningkatan produktivitas kakao. Simulasi perhitungan tersebut dilakukan untuk masing-masing indikator.

- **Langkah 5: Memperkirakan Angka Indikator jika Tindakan Dilaksanakan**
  - ➔ Hitunglah perubahan yang akan terjadi ketika regulasi diterapkan
  - ➔ Buatlah rentang waktu perkiraan terhadap munculnya manfaat
  - ➔ Penggunaan rentang waktu yang sama harus kepada seluruh alternatif agar alternatif tersebut dapat dibandingkan

**Rentang waktu analisis (*planning horison*)**

- ➔ Perkiraan rentang waktu untuk setiap alternatif, terutama untuk manfaatnya.
- ➔ Rentang waktu antara manfaat dan biaya harus sama.

**Selalu Ingat !!**

Manfaat muncul kalau regulasi yang diterapkan dipatuhi. Dengan kata lain, tanpa adanya kepatuhan terhadap regulasi akan menyebabkan tidak terealisasinya manfaat yang diperkirakan. Oleh karena itu, dalam hal ini, harus realistis dalam memperkirakan seberapa besar persentase tingkat kepatuhan pihak yang diatur

**Catatan:**

Jika besar manfaat dan biaya setiap tahun sama, gunakan perhitungan untuk satu tahun saja. Jika kasusnya berbeda, dalam artian, biaya harus dikeluarkan pada tahun-tahun awal penerapan kebijakan, sementara manfaat baru akan dirasakan beberapa tahun setelah kebijakan berjalan. Pada kasus seperti ini, perlu digunakan rentang waktu yang lebih panjang dan juga teknik diskonto untuk angka yang digunakan.

Ada 4 (empat) panduan yang praktis dalam memperkirakan indikator dan keakuratannya, yaitu:

1. Gunakan lebih banyak waktu dan dana pada analisis secara proporsional dengan perkiraan kasar total biaya yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Hentikan alokasi lebih banyak waktu dan dana untuk suatu alternatif yang tidak

lebih baik dari alternatif lain.

3. Kurangi alokasi waktu dan dana untuk alternatif yang biayanya jelas melebihi manfaat.
4. Jika analisis yang dilakukan memperlihatkan bahwa satu alternatif secara jelas lebih baik dari yang lain, alokasikan lebih sedikit waktu dan dana untuk analisis alternatif tersebut karena jelas manfaatnya melebihi biayanya. Pada saat apa yang harus dilakukan sudah menjadi jelas, tidak banyak lagi gunanya mengumpulkan informasi tambahan.

**Catatan:**

- ➔ Biarkan analisis yang telah dilakukan mengarah pada rekomendasi yang tepat bukan sebaliknya.
- ➔ Pastikan untuk selalu menggunakan pandangan yang luas, dan tanyalah pada diri sendiri apakah asumsi yang digunakan sudah sesuai sepanjang proses analisis.
- ➔ Jika ditemukan ketidakpastian ketidakpastian mengenai nilai aktual dari satu atau lebih variabel yang digunakan dalam model analisis, lakukan analisis sensitivitas.

#### ANALISIS SENSITIVITAS

Analisis sensitivitas merupakan alat sederhana yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana indikator yang digunakan tergantung kepada nilai beberapa variabel tertentu. Yang harus dilakukan adalah mengulang perhitungan seandainya terjadi perubahan pada satu atau lebih variabel yang secara realistis sulit untuk ditetapkan dengan pasti. Dari analisis ini akan dapat diambil kesimpulan apakah hasil perkiraan tersebut sensitif (peka) atau tidak terhadap perubahan beberapa variabel tertentu.

Dalam melakukan analisis sensitivitas, harus disajikan hasil perkiraan dalam bentuk kisaran. Kisaran untuk variabel-variabel yang tidak dapat dipastikan bergerak dari batas bawah sampai dengan batas tertinggi. Apa yang harus disimpulkan adalah apakah rekomendasi yang dihasilkan tergantung kepada nilai variabel yang tidak pasti tersebut. Jika ya, maka laporan harus menyatakan hal tersebut dengan jelas. Jika tidak, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Jika dalam suatu kesimpulan yang diperoleh adalah hasil perhitungan yang sensitif terhadap perubahan suatu variabel tertentu, maka layak untuk dipertimbangkan untuk melakukan analisis sensitivitas kembali untuk mencoba untuk mendapatkan hasil perkiraan yang lebih akurat. Jika perlu dilakukan diskonto terhadap perhitungan yang telah dilakukan, maka analisis sensitivitas harus dilakukan berdasarkan nilai yang telah didiskonto.

➤ **Langkah 6: Menterjemahkan Kepada Unit yang Sama**

Idealnya, semua manfaat dan biaya harus diukur dengan unit yang sama karena akan mempermudah untuk memutuskan apakah suatu alternatif dapat diterapkan atau tidak. Gunakan unit pengukuran yang sama, tidak harus selalu satuan uang.

Jika manfaat tidak bisa dinilai, dalam artian manfaat tersebut *intangible*, gunakanlah *proksi* yang didasarkan pada barang dan jasa yang dipasarkan.

### ➤ Langkah 7: Meringkas Hasil Analisis Manfaat

Sebagai tahap akhir keseluruhan langkah dalam analisis manfaat, ringkaslah hasil analisis manfaat untuk masing-masing alternatif. Untuk setiap tahun dalam rentang waktu yang digunakan, tentukan siapa yang mendapatkan apa. Buatlah juga catatan atas beberapa manfaat dan biaya yang belum terkuantifikasi pada masing-masing alternatif. Jika ada catatan mengenai akurasi beberapa perkiraan, maka sebagian dari masalah ini seharusnya sudah dapat atasi dengan melakukan analisis sensitivitas. Akan tetapi untuk hal-hal yang masih meninggalkan ketidakpastian yang tinggi perlu dikemukakan sebagai bahan pertimbangan pengambil keputusan.

#### ISI DARI RINGKASAN ANALISIS MANFAAT:

- ⇒ Step 1 ▶ Daftar manfaat (keadaan yang lebih baik)
- ⇒ Step 2 ▶ Siapa yang menerima manfaat
- ⇒ Step 3 ▶ Menentukan indikator untuk setiap manfaat
- ⇒ Step 4 ▶ Hitung nilai indikator jika tidak dilakukan apa-apa (*baseline*)
- ⇒ Step 5 ▶ Prakiraan nilai indikator jika dilakukan tindakan
- ⇒ Step 6 ▶ Nilai diterjemahkan dalam unit pengukuran yang sama

#### TIDAK KETINGGALAN BEBERAPA HAL YANG HARUS ADA DALAM RINGKASAN HASIL ANALISIS ADALAH:

- ➊ Tuliskan siapa mendapatkan apa pada setiap tahun
- ➋ Catat manfaat yang belum terkuantifikasi dan berikan penilaian terbaik
- ➌ Laporkan asumsi-asumsi yang anda gunakan dan catatan tentang akurasi perkiraan yang dilakukan.

### III.4.4.2. Analisis Biaya

Secara sederhana biaya dari sesuatu dapat didefinisikan sebagai berapa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu tersebut yang berbentuk manfaat.

**Biaya = 'Berapa yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu (manfaat)'**

Langkah-langkah dalam analisis biaya persis sama dengan langkah-langkah dalam analisis biaya, yaitu:

- **Langkah 1:** Identifikasi biaya yang muncul akibat diterapkannya suatu regulasi. Biaya adalah pengaruh regulasi yang menyebabkan suatu pihak berkurang atau menurun tingkat manfaatnya. Konsultasi dengan pihak terkait akan memperkaya daftar biaya yang teridentifikasi dengan menambahkan yang belum terpikirkan sebelumnya dan menghapus dari daftar biaya hal-hal yang secara praktis tidak akan terjadi di lapangan.
- **Langkah 2:** Tentukan siapa yang menanggung biaya. Pastikan untuk mengklarifikasi kepada pihak yang diperkirakan akan menanggung biaya, apakah

mereka setuju dengan yang kita perkirakan.

- **Langkah 3:** Putuskan bagaimana caranya mengukur biaya. Pilih indikator untuk mengukur biaya dari tahun ke tahun selama rentang waktu yang ditentukan.
- **Langkah 4:** Tetapkan dasar perbandingan (*baseline*). Perkirakan apa yang akan terjadi terhadap berbagai indikator yang digunakan seandainya regulasi tidak diterapkan (keadaan *status quo*). Perkiraan ini akan menjadi dasar perbandingan untuk melihat pengaruh diterapkannya suatu regulasi. Dalam banyak kasus, keadaan sebelum diterapkannya regulasi dapat digunakan sebagai data dasar perbandingan (*baseline*). Namun tidak jarang, lebih masuk akal jika diperkirakan kondisi tidak akan tetap seperti sekarang seandainya regulasi tidak diterapkan. Kondisi yang terjadi dapat menjadi lebih buruk atau lebih baik dari kondisi sekarang jika regulasi tidak diterapkan.
- **Langkah 5:** Perkirakan apa yang akan terjadi. Lakukan prediksi terhadap perubahan masing-masing indikator jika regulasi diterapkan.
- **Langkah 6:** Konversikan semaksimal mungkin berbagai ukuran biaya ke dalam unit yang sama sehingga dapat dibandingkan.
- **Langkah 7:** Ringkaskan hasil yang telah diperoleh dengan menyebutkan, untuk masing-masing alternatif, biaya yang ditanggung, oleh siapa, kapan, dan bagaimana jika dibandingkan dengan *baseline* (data dasar).

#### III.4.4.2.1 “Konsep akuntansi vs ekonomi”

Akuntan akan melihat biaya regulasi tersebut dalam bentuk berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing pihak yang terkena dampak regulasi dalam melakukan penyesuaian untuk memenuhi ketentuan regulasi tersebut. Ekonom berpikir lebih jauh mengenai apa yang harus dikorbankan oleh masing-masing pihak (dampak).

##### HAL KUNCI DALAM ANALISIS BIAYA

- ⇒ Reaksi (*response*) pihak yang terpengaruh
  - ▶ Perlu alat baru? Birokrasi tambah panjang? Administrasi lebih banyak? (bagaimana sekarang & bagaimana reaksinya)
- ⇒ Identifikasi Biaya-Biaya yang mungkin timbul
- ⇒ Estimasi nilainya
- ⇒ Gunakan periode yang sama dengan periode yang digunakan untuk mengukur benefit
- ⇒ Hindari *double-counting*:
  - ▶ Kenaikan biaya produksi ▶ Laba? Gaji karyawan? Harga bagi konsumen? Harga bagi pemasok?

Untuk usulan alternatif yang cakupannya kecil, mungkin kita bisa berpikir seperti seorang akuntan. Namun untuk usulan-usulan yang besar, cakupan dalam berpikir juga mungkin harus lebih luas seperti halnya seorang ekonom. Biaya biasanya merupakan bagian yang lebih mudah diidentifikasi, paling tidak jika digunakan konsep akuntansi, dibandingkan dengan manfaat suatu regulasi. Satu hal yang harus selalu diingat dalam analisis biaya adalah **menghindari terjadinya perhitungan ganda**.

### III.4.4.2.2. Apa yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis biaya?

#### a. Reaksi (*response*) pihak yang terpengaruh

Kunci dalam menilai biaya adalah memperkirakan bagaimana setiap orang yang terkena pengaruh akan bereaksi jika usulan regulasi diterapkan.

#### b. Dampak Biaya bagi Beberapa Pihak

Seperti yang telah disebutkan di atas, dalam penerapan suatu regulasi, ada beberapa pihak yang akan terkena dampak. Dampak tersebut dapat berupa biaya bagi masing-masing pihak. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah masyarakat, termasuk pengusaha dan konsumen, maupun Pemerintah sendiri.

➤ Biaya terhadap bisnis

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memperhitungkan biaya dari suatu penerapan regulasi terhadap dunia usaha seperti dibawah ini:

#### CHECKLIST UNTUK MELIHAT BIAYA TERHADAP DUNIA USAHA:

- Apakah regulasi akan mempengaruhi biaya produksi atau lingkungan bisnis di Indonesia?
- Apakah regulasi akan membuat perusahaan di Indonesia lebih sulit beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar? Misalnya apakah semakin sulit untuk memperkenalkan produk baru atau meningkatkan produk yang ada dalam rangka memenuhi keinginan konsumen?
- Apakah regulasi akan menyebabkan perusahaan di Indonesia akan terbebani dengan tuntutan yang tidak dihadapi oleh perusahaan mereka di luar negeri?
- Apakah regulasi menyebabkan tingkat persaingan antar perusahaan menurun?

➤ Biaya Terhadap Konsumen

Banyak regulasi yang mempengaruhi harga, kualitas atau ketersediaan barang bagi konsumen. Pengaruh-pengaruh ini harus dikaji secara hati-hati karena biasanya konsumen tidak terlalu tertarik untuk mengekspresikan kepentingannya. Mengevaluasi pengaruh regulasi terhadap konsumen berpotensi mengecoh analis karena konsumen tidak jarang merespon perubahan harga dan ketersediaan barang secara ekonomi bukan politik. Mereka tidak menyatakan ketidak setujuan mereka dengan turun ke jalan tetapi dengan membeli barang tersebut lebih sedikit dan beralih ke barang substitusi. Dalam kasus yang lebih ekstrim, mereka mungkin mereka akan melakukan penyelundupan atau menghindari dari pajak. Para analis RIA harus memperhitungkan kemungkinan reaksi konsumen untuk setiap alternatif yang dipertimbangkan.

➤ Biaya Terhadap Pemerintah

Banyak alternatif regulasi yang menuntut pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk mengimplementasikan regulasi tersebut. Dana tersebut dibutuhkan untuk menutupi biaya administrasi, biaya pelaksanaan, dan biaya untuk perlengkapan agar regulasi tersebut dapat dijalankan. Biaya-biaya ini juga tetap

harus diperkirakan walaupun regulasi bersifat *cost recovery*, dimana misalnya pengguna fasilitas diharuskan untuk membayar. Besarnya penerimaan dari pembayaran tersebut dapat dimasukkan dalam manfaat.

### III.4.4.3. Bagaimana melakukan perbandingan manfaat dan biaya?

Di tahap ini, seharusnya sudah cukup banyak informasi dan data yang dikumpulkan untuk setiap alternatif tindakan yang dipertimbangkan. Untuk masing-masing alternatif, telah diperkirakan nilai manfaat dan biaya untuk setiap tahun dalam rentang waktu analisis yang telah ditetapkan. Demikian juga pihak yang menanggung biaya dan mendapatkan manfaat, seharusnya juga sudah dapat diidentifikasi. Karena adanya unsur ketidakpastian, maka beberapa perkiraan dapat disajikan dalam bentuk kisaran. Selain itu, mungkin juga telah diidentifikasi beberapa manfaat dan biaya yang sulit untuk dikuantifikasi.

Pekerjaan berikutnya yang harus dilakukan adalah bagaimana meringkas dan menyajikan informasi yang telah dikumpulkan tersebut untuk membantu pengambil keputusan dalam menentukan alternatif yang dipilih.

**Pertanyaan 1: Alternatif mana yang terbaik?**

**Pertanyaan 2: Apakah manfaat dari alternatif yang terbaik menutup biayanya?**

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dan menuliskan laporannya, harus dipertimbangkan apakah data dan informasi yang telah diperoleh membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Secara khusus, perlu dilakukan salah satu atau beberapa pekerjaan berikut:

- a. Melakukan diskonto terhadap hasil perkiraan untuk memperhitungkan nilai terhadap waktu;
- b. Mengkaji distribusi manfaat dan biaya; dan
- c. Menilai tingkat keterandalan (reliabilitas) hasil anda.

#### a. Melakukan Diskonto

Nilai manfaat dan biaya tergantung dari kapan para pihak menerima manfaat dan harus membayar biaya tersebut, maka perlu dilakukan terlebih dahulu netralisasi pengaruh waktu sebelum membandingkan manfaat dan biaya tersebut. Melakukan diskonto dapat dianggap sebagai mengkonversi seluruh manfaat dan biaya ke data dasar yang sama sehingga dapat dibandingkan.

Untuk memutuskan apakah perlu dilakukan proses diskonto terhadap suatu perkiraan, uji berikut dapat digunakan:

- ➔ Untuk setiap alternatif, hitung rasio manfaat dan biaya untuk setiap tahun dalam rentang waktu yang telah ditetapkan.
- ➔ Jika rasio manfaat dan biaya untuk masing-masing alternatif tersebut berubah dengan berjalannya waktu, maka harus dilakukan diskonto terhadap perkiraan yang telah ditetapkan.
- ➔ Jika rasio manfaat dan biaya konstan dengan berjalannya waktu, proses diskonto

tidak diperlukan. Cukup digunakan tahun yang mana saja untuk membandingkan manfaat dan biaya atau satu alternatif dengan alternatif lainnya.

#### **b. Mengkaji Distribusi Manfaat dan Biaya**

Didalam setiap penerbitan kebijakan, Selalu akan ada kelompok yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh suatu kebijakan. Tidak ada aturan yang secara jelas menetapkan kapan redistribusi manfaat dan biaya dapat dibenarkan atau tidak dapat dibenarkan. Namun yang jelas, pengambilan keputusan harus diberi informasi akan distribusi manfaat dan biaya. Konsekuensinya, mungkin perlu dilakukan analisis lebih jauh. Langkah selanjutnya adalah harus diperlihatkan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh suatu alternatif kebijakan, berikut juga alasan-alasannya.

#### **c. Menilai Keandalan (Reliabilitas) Hasil Analisis**

Jawaban terhadap pertanyaan 1 (alternatif mana yang terbaik?) dan pertanyaan 2 (apakah manfaat alternatif terbaik melebihi biayanya?) mungkin sangat tergantung pada beberapa variabel yang mengandung ketidakpastian atau pada akurasi beberapa asumsi yang digunakan. Kajiilah apa benar demikian. Jika ya, maka perlu melakukan analisis sensitivitas lebih jauh.

Jika kesimpulan yang didapat tidak begitu pasti, mungkin perlu dipertimbangkan apakah mengumpulkan data lebih banyak akan dapat meningkatkan tingkat keyakinan dari kesimpulan yang didapat. Artinya apakah mungkin tingkat ketidakpastian variabel kunci yang digunakan dikurangi atau ujilah keakuratan asumsi-asumsi utama yang mendasari kesimpulan dari analisis yang dilakukan.

### **III.4.4.4. Bagaimana cara menyajikan hasil analisis?**

Tujuan dalam menyajikan hasil analisis adalah meringkaskan pilihan yang dipertimbangkan dalam analisis, termasuk pilihan tidak melakukan apa-apa, dengan cara yang dapat mempermudah pengambilan keputusan. Ingat kembali bahwa dalam RIA perlu ditunjukkan secara jelas bahwa alternatif terbaik diantara berbagai alternatif regulasi dan non-regulasi telah dipilih dan perkiraan manfaat dari alternatif tersebut menutupi perkiraan biaya. Manfaat harus disejajarkan dengan biaya yang harus dibayar dan penjelasan harus diberikan bahwa alternatif yang diusulkan tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

Ketika menyajikan hasil analisis, pertimbangkan hal-hal berikut:

- ☞ Coba fokuskan pada aspek dimana masing-masing alternatif tersebut berbeda atau dengan kata lain hal-hal yang sama pada berbagai alternatif tersebut tidak perlu ditonjolkan.
- ☞ Jangan lupa untuk menguraikan dan mendiskusikan manfaat dan biaya yang tidak dapat dikuantifikasikan.
- ☞ Sediakan informasi tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.
- ☞ Laporkan asumsi-asumsi dasar yang digunakan dan hasil analisis sensitivitas yang dilakukan. Secara khusus, jika jawaban terhadap salah satu pertanyaan (pertanyaan 1 atau 2) tergantung pada beberapa variabel yang tidak pasti atau didasarkan pada



asumsi tertentu sehingga kesimpulannya tidak begitu meyakinkan, maka jelaskan hal-hal tersebut.

- ↪ Jika dilakukan diskonto, laporkan semua perkiraan manfaat dan biaya dalam nilai sekarang dan harus dilakukan analisis sensitivitas berdasarkan nilai yang sudah di diskonto tersebut.

Setelah argumentasi disajikan untuk merekomendasikan suatu alternatif tindakan, penilaian akhir berada pada pengambil keputusan. Disinilah akan muncul penilaian-penilaian yang lebih bersifat subyektif seperti pertimbangan politis. Hal ini masih dapat dibenarkan karena seperti telah dinyatakan sebelumnya tidak semua manfaat dan biaya dapat dikuantifikasikan, relatifnya konsep keadilan dan seringkali pihak yang diuntungkan berbeda dengan pihak yang dirugikan.

#### CHECKLIST UNTUK TAHAPAN ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA:

- ☑ Siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh masing-masing alternatif regulasi? (publik, swasta, pemerintah, produsen, konsumen, dan lain-lain)
- ☑ Apa bentuk manfaat yang diterima dan biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak yang terkena pengaruh diterapkannya regulasi dan bagaimana masing-masing manfaat dan biaya tersebut dapat diukur?
- ☑ Seberapa besarnya masing-masing manfaat dan biaya tersebut di atas dibandingkan dengan baseline yang digunakan? (ukuran kuantitatif atau kualitatif).
- ☑ Dengan memperhitungkan seluruh manfaat dan biaya, baik yang dapat dikuantifikasi ataupun tidak, apakah manfaat masing-masing alternatif melebihi biayanya atau sama atau sebaliknya?
- ☑ Untuk semua alternatif yang layak (manfaat melebihi biaya) alternatif mana yang memiliki rasio manfaat biaya yang tertinggi?

#### Contoh perhitungan biaya dan manfaat

Untuk mengatasi akar permasalahan komoditas kakao di Majene, yaitu lemahnya SDM petani serta berdasarkan hasil identifikasi masalah dan tujuan yang akan dicapai, diambil empat alternative tindakan, yaitu sebagai berikut:

- ❖ **Alternatif Pertama:** *Tidak melakukan apapun (Do Nothing)*
- ❖ **Alternatif Kedua:** *Revisi Perda SOTK Mejene untuk membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan*
- ❖ **Alternatif Ketiga:** *Membentuk Perda tentang kelembagaan kelompok tani*
- ❖ **Alternatif Keempat:** *Program peningkatan kapasitas penyuluh*

Untuk memilih alternatif tindakan yang terbaik dilakukan analisis manfaat dan biaya terhadap masing-masing alternatif. Dibawah ini adalah tabel analisis manfaat dan biaya dari masing-masing alternatif berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Besarnya manfaat atau biaya ditunjukkan/diukur dengan indeks skor dengan skala -3 sampai dengan 3. Angka positif menunjukkan manfaat yang didapat oleh setiap stakeholder, dan angka negatif menunjukkan biaya/kerugian yang ditanggung oleh stakeholders. Sementara angka 0 (nol) menunjukkan tidak ada biaya maupun manfaat (netral) untuk

indikator yang dimaksud, atau kondisinya tidak berubah. Semakin besar angka berarti semakin besar manfaat yang diperoleh, dan semakin kecil angka berarti biaya yang ditanggung semakin besar, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Manfaat	Netral	Biaya
3 = Manfaat Besar	0 = Netral/Tidak Ada Pengaruh/Tidak Ada Perubahan	-3 = Biaya besar
2 = Manfaat Sedang		-2 = Biaya Sedang
1 = Manfaat Kecil		-1 = Biaya Kecil

Ringkasan dari analisis biaya dan manfaat dari masing-masing alternatif yang relevan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Kelompok/ Stakeholders	Manfaat atau Biaya	Alternatif Tindakan			
		I	II	III	IV
Pemerintah Daerah	1. Tambahan Anggaran (APBD)	0	3	0	0
	2. Kemudahan koordinasi antar SKPD	-1	1	1	2
	3. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program bantuan ke petani	-1	1	3	1
	4. Biaya pembentukan/revisi perda	0	-3	-3	0
	5. Resistensi antar SKPD	0	-3	0	0
	6. Biaya politik	0	-3	-1	0
	7. Biaya operasional (staf, sarana & prasarana, sosialisasi)	0	-3	-1	-1
	8. Kelompok target pembinaan dapat lebih terarah	-1	1	3	1
	9. Pengawasan pelaksanaan program-program	-1	0	3	0
	10. Peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	0	2	2	1
	11. Tersedianya data organisasi dengan jelas	-1	0	3	0
Penyuluh	1. Fasilitas operasional penyuluh	0	3	0	2
	2. Optimalisasi pelaksanaan pendampingan	-1	3	3	3
	3. Efisiensi pelaksanaan pendampingan	-1	3	3	3
	4. Pengetahuan & keterampilan PPL	-1	3	0	3
	5. Ketersediaan/Kecukupan PPL tiap desa	-1	3	0	3
	6. Insentif sertifikasi	0	3	0	1
DPRD	Penyaluran Aspirasi Konstituen	0	1	2	0
Petani	1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani	-1	3	3	3
	2. Penguatan kapasitas petani	-1	2	3	3
	3. Keberlangsungan program pelatihan dan pendampingan kepada petani	-1	3	3	3
	4. Ter-advokasinya permasalahan petani	-1	2	3	2

Kelompok/ Stakeholders	Manfaat atau Biaya	Alternatif Tindakan			
		I	II	III	IV
Petani	5. Tingkat kualitas dan kuantitas kakao	-1	2	2	2
	6. Akses terhadap permodalan/keuangan	-1	2	3	1
	7. Stabilitas dan standarisasi harga kakao	-1	2	3	0
	8. Tingkat pendapatan dan kesejahteraan	-1	3	3	2
	9. Biaya modal produksi	0	-1	-1	-1
	10. Akses informasi harga dan informasi lainnya	-1	0	3	0
Pedagang pengumpul	1. Kemudahan mendapatkan biji kakao	-1	1	-1	1
	2. Kualitas dan kuantitas kakao	-1	2	2	2
	3. Standar harga kakao	1	-1	-2	-1
	4. Keuntungan/laba	1	1	-1	1
	5. Biaya operasional	-1	-1	-2	-1
Perusahaan	1. Kemudahan (akses informasi) & kepastian mendapatkan bahan baku	-1	3	3	1
	2. Kualitas dan kuantitas kakao	-1	2	2	2
	3. Informasi standar harga kakao	0	0	0	0
	4. Keuntungan/laba	-1	2	3	2
	5. Biaya operasional	-1	1	1	1
	6. Akses informasi lainnya	-1	0	3	0
Total		-24	43	51	42

### III.4.5. Konsultasi Publik

Menurut UU No.12 Tahun 2011 terkait dengan partisipasi masyarakat, dikatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masukan tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. Rapat Dengar Pendapat Umum;
- b. Kunjungan Kerja;
- c. Sosialisasi; dan/atau
- d. Seminar, Lokakarya, dan/atau Diskusi

Di dalam pembuatan kebijakan, setiap Rancangan Peraturan atau kebijakan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat agar masyarakat dapat memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan. Hal yang mendasari dilakukannya Konsultasi Publik dalam setiap pembuatan kebijakan adalah Pemerintah (regulator) tidak memiliki informasi yang sempurna mengenai persepsi publik terhadap permasalahan yang akan dipecahkan dan kemungkinan apa yang akan terjadi seandainya regulasi diberlakukan. Konsultasi dengan banyak pihak akan meningkatkan kualitas regulasi yang dihasilkan.

Para pihak yang terkait (*stakeholders*) memiliki posisi yang beragam. *Stakeholder* utama adalah pihak yang akan terkena pengaruh dari suatu kebijakan. *Stakeholder* sekunder

Pengalaman di negara industri menunjukkan bahwa, pelembagaan konsultasi publik merupakan mekanisme efektif untuk mengidentifikasi berbagai potensi konflik dan membangun konsensus. Mempelajari berbagai metode konsultasi dari luar merupakan sumber berharga bagi pimpinan daerah untuk membangun pemerintahan yang partisipatif. Indonesia memiliki pengalaman praktek “musyawarah”, yang perlu terus diperkaya. UU 34/2004, Ombudsman, merupakan contoh indikator penting tumbuhnya pemerintahan yang partisipatif dan transparan.

adalah institusi perantara dalam proses implementasi. *Stakeholder* kunci adalah pihak yang dapat mempengaruhi hasil dalam proses penyusunan regulasi. Pada akhirnya Pemerintahlah (eksekutif dan legislatif) yang pada akhirnya mengambil keputusan akhir dan yang akan dimintai pertanggung jawabannya. Konsultasi publik berguna untuk menutup gap antara kebijakan dan harapan publik. Di dalam proses RIA sendiri, konsultasi publik melingkupi keseluruhan tahapan.

#### III.4.5.1. Apa tujuan proses konsultasi?

Secara umum tujuan dilakukannya konsultasi kepada pihak-pihak yang diperkirakan terkait dengan suatu regulasi adalah untuk meningkatkan kualitas regulasi yang kelak akan diterapkan. Kualitas yang lebih baik dapat dicapai karena:

1. Permasalahan dan akar permasalahan yang terjadi dapat dipelajari lebih dalam.
2. Masukan dari pihak yang terkait dapat memperkaya alternatif pemecahan masalah dengan solusi-solusi yang belum terpikirkan sebelumnya maupun yang lebih baik operasionalnya dilapangan.
3. Masukan dari pihak-pihak yang berbeda kepentingan akan menolong regulator untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda tersebut dalam regulasi yang akan diterapkan. Suatu aturan biasanya jarang yang mampu menyenangkan semua pihak. Akan selalu ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Proses konsultasi dapat menggali berbagai kepentingan yang berbeda tersebut dan mengakomodasikannya semaksimal mungkin dalam regulasi yang akan diterapkan.
4. Pada tahap evaluasi biaya dan manfaat setiap alternatif solusi, konsultasi akan membantu regulator memeriksa kerealistisan dan keakuratan perkiraan biaya dan manfaat yang telah dilakukan.
5. Konsultasi akan memberikan masukan perkiraan apa yang akan terjadi seandainya suatu regulasi diterapkan. Perkiraan ini berguna untuk meminimumkan resiko yang belum diperhitungkan sebelumnya.
6. Pada kasus suatu aturan hanya mengatur atau memecahkan masalah secara parsial, konsultasi akan memberikan masukan mengenai keterkaitan regulasi tersebut dengan regulasi-regulasi lain yang terkait dengan masalah yang sama. Hal ini akan mencegah terjadinya tumpang tindih yang tidak perlu untuk memecahkan masalah yang sama atau bahkan terjadinya kontradiksi antara satu regulasi dengan regulasi lainnya.
7. Dengan diakomodasinya berbagai kepentingan semaksimal mungkin, maka diharapkan tingkat penerimaan terhadap regulasi menjadi lebih besar atau paling tidak dapat diramalkan sebelumnya.

8. Konsultasi akan meningkatkan kredibilitas regulasi yang dirumuskan karena memberikan kesan kepada masyarakat umum bahwa regulasi ini tidak hanya dirumuskan di belakang meja. Walaupun mustahil untuk menyenangkan semua pihak dengan suatu regulasi, proses konsultasi paling tidak akan memberi kesan bahwa kepentingan sebagian besar masyarakat sudah diperhitungkan dan akibat buruk dari regulasi tersebut sudah diantisipasi.

#### III.4.5.2. Mengapa konsultasi perlu direncanakan?

Rencana konsultasi harus dipersiapkan secara tertulis di luar proses RIA. Rencana ini harus dianggap sebagai dokumen yang fleksibel dan selalu dapat dirubah sesuai dengan perkembangan informasi yang diperoleh dari partisipan. Rencana konsultasi paling tidak harus mencakup daftar pihak-pihak yang akan dikonsultasi, mekanisme konsultasi dan daftar informasi atau isu yang direncanakan akan dikonsultasikan kepada masing-masing pihak.

#### III.4.5.3. Bagaimana Mengidentifikasi Pihak (*Stakeholder*) yang Dikonsultasi?

Lakukan langkah-langkah berikut dalam identifikasi *stakeholder* yang akan dikonsultasi:

- a. Identifikasi secara terpisah kelompok yang secara signifikan akan dipengaruhi oleh regulasi yang akan diterapkan.
- b. Kelompokkan mereka menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil yang kemungkinan akan menerima pengaruh secara berbeda-beda (pemerintah, konsumen dan produsen/pengusaha)
- c. Dari masing-masing kelompok, pisahkan lagi menjadi beberapa kelompok kecil, seperti umur, tingkat kewenangan (pusat, daerah) dan lainnya.

Pertanyaan-pertanyaan berikut mungkin dapat membantu mengidentifikasi siapa seharusnya yang dikonsultasi.

- ↪ Kepada siapa regulasi ditujukan? (dengan kata lain siapa yang diharapkan harus merubah perilakunya?)
- ↪ Siapa yang akan dirugikan secara tidak langsung? (Kelompok ini mungkin mencakup perusahaan pada industri yang terkait, konsumen atau siapapun yang pada akhirnya ikut membayar sebagian biaya dari regulasi).
- ↪ Siapa yang mendapatkan manfaat?
- ↪ Siapa yang mempunyai keahlian dalam masalah yang berkaitan dengan regulasi yang sedang dirumuskan?

#### III.4.5.4. Apa Saja Mekanisme Konsultasi?

Konsultasi dengan pihak terkait dapat dan harus dilakukan dengan berbagai mekanisme baik formal maupun informal. Pilihan metode yang dapat dilakukan antara lain:

- Publikasi *draft* regulasi dengan permohonan untuk memberikan masukan terhadap *draft* tersebut.
- Publikasi *draft* RIAS dengan permohonan kepada pembaca untuk memberikan masukan.

- Pertemuan dengan pengamat ahli, pihak yang akan terkena akibat regulasi, dan masyarakat umum. Pertemuan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pertemuan kecil informal atau formal dan besar seperti seminar dan simposium.
- Penunjukan badan konsultasi yang terus menerus dikonsultasi selama proses RIA.
- Publikasi *draft* RIA yang relevan di internet dengan permohonan kepada pembaca untuk memberikan komentar melalui email.

### III.4.5.5. Apa Saja Tingkatan Proses Konsultasi?



*Diseminasi informasi: Pemberian informasi sepihak, merupakan tingkat keterlibatan terendah, dilakukan melalui liflet, iklan, dst.*

- Konsultasi:** Komunikasi dua arah, diselenggarakan melalui dengar pendapat, debat publik, kelompok kerja, dst.
- Kolaborasi:** Pelembagaan bentuk konsultasi dalam bentuk lembaga permanen, antara lain komisi nasional, ombudsman, dll.
- Delegasi:** Pelimpahan fungsi khusus, merupakan tingkat keterlibatan terkuat. Contohnya hak asosiasi hotel (PHRI) untuk melakukan sertifikasi kelas hotel; Ikatan Dokter Indonesia untuk mengeluarkan izin praktek,

### III.4.5.6. Bagaimana Mengidentifikasi Informasi yang Akan Dicari Selama Konsultasi?

Sebelum melakukan konsultasi, perlu dilakukan identifikasi terhadap informasi yang akan digali selama konsultasi. Identifikasi informasi ini berdasarkan permasalahan, kemampuan pemerintah untuk mengatasinya, pilihan regulasi atau non-regulasi yang dapat digunakan dan seterusnya. Untuk memperoleh informasi yang relevan, perlu dilakukan juga identifikasi terhadap kelompok-kelompok yang relevan. Untuk mendapatkan informasi, dapat melalui kegiatan *survey*, walaupun *survey* seperti ini mungkin tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai konsultasi karena responden tidak diberikan informasi mengenai *draft* regulasi yang sedang dianalisa.

### III.4.5.7. Bagaimana dengan Negara Lain?

Konsultasi dalam konteks RIA tidak selalu mudah. Banyak orang dan kelompok yang tidak mempercayai pemerintah secara umum. Pada mulanya, kelompok-kelompok terkait mungkin belum mempunyai pengalaman keterlibatan yang banyak dalam proses RIA dan tidak begitu memahami bagaimana informasi yang mereka berikan akan diperlakukan. Oleh karena itu, perlu terlebih dahulu dibangun rasa saling percaya sehingga kelompok-kelompok terkait tersebut dengan sukarela mau berpartisipasi secara penuh dalam proses RIA.

OECD telah mengkompilasi beberapa pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman mereka melakukan proses konsultasi untuk RIA. Secara ringkas, pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa konsultasi perlu dijadikan proses interaktif yang terjadi sepanjang pelaksanaan RIA. Beberapa pelajaran yang perlu diperhatikan adalah:

- Konsultasi harus dimulai sesegera mungkin.
- Partisipan pada proses konsultasi harus diberikan informasi sedini mungkin tentang draf regulasi yang sedang dipertimbangkan dan tentang RIA yang sedang dilakukan.
- Tim pelaksana RIA harus proaktif dalam menemukan orang dan kelompok yang relevan untuk berpartisipasi dalam konsultasi.
- Dalam rangka membangun rasa saling percaya antara partisipan dengan tim RIA, konsultasi harus dirancang lebih sebagai sebuah dialog yang berkelanjutan dan bukan sebagai sebuah pertemuan tunggal.
- Konsultasi seharusnya merupakan proses yang transparan; mereka yang berpartisipasi dan bagaimana mereka berpartisipasi harus menjadi informasi yang dapat diakses oleh publik selama proses RIA berlangsung dan dilaporkan dalam RIAS.

#### III.4.5.8. Apa Saja Prinsip Kunci Proses Konsultasi?

- Konsultasi secara umum dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi, membangun penerimaan terhadap regulasi oleh pihak yang akan terkena regulasi, dan meningkatkan kredibilitas tim pelaksana RIA serta hasil analisis mereka.
- Konsultasi dapat dan harus dilaksanakan dengan berbagai cara, baik pertemuan informal sampai pertemuan besar dan formal seperti seminar dan simposium.
- Konsultasi harus direncanakan terlebih dahulu secara tertulis sebelum RIA dilaksanakan dan rencana tersebut harus diperlakukan sebagai dokumen yang fleksibel yang dapat terus berubah sesuai dengan perkembangan informasi yang diperoleh dari partisipan.
- Rencana konsultasi harus memuat identifikasi tenaga ahli, *stakeholders*, dan masyarakat umum yang akan diundang untuk dikonsultasi dan informasi yang akan digali dari masing-masing pihak.
- Konsultasi perlu dijadikan sebagai proses yang bersifat interaktif yang secara terus menerus dilakukan sepanjang pelaksanaan RIA.

#### CHECKLIST UNTUK TAHAPAN KONSULTASI

- Pihak mana saja yang dikonsultasi? (individual, kelompok, asosiasi, lembaga, dan lain-lain).
- Apa mekanisme yang digunakan untuk masing-masing proses konsultasi yang dilakukan? (pertemuan langsung, publikasi paper, seminar, dan lain-lain)
- Apa hasil dari masing-masing konsultasi yang dilakukan dan bagaimana regulasi yang diusulkan berubah akibat hasil konsultasi tersebut?
- Jika setelah konsultasi masih ada individual atau kelompok yang tidak mendukung rencana regulasi tersebut, siapa pihak-pihak yang masih menentang tersebut dan apa argumen yang mereka ajukan?
- Seandainya untuk beberapa pihak tertentu konsultasi tidak dilakukan (padahal seharusnya dilakukan) atau dilakukan sangat terbatas, sebutkan pihak-pihak tersebut dan apa alasannya?

## Contoh Konsultasi Publik

Dibawah ini disajikan tabel ringkas yang memuat hal-hal yang harus diperhatikan dalam konsultasi publik yang akan dilakukan untuk mendukung implementasi alternative kebijakan pemecahan masalah kakao di Majene

KONSULTASI PUBLIK	
Check List Question	Perda Kelompok Tani
1) Identifikasi pihak mana sajakah yang relevan untuk dilakukan konsultasi?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petani</li> <li>2. KTNA</li> <li>3. Penyuluh</li> <li>4. KPPK</li> <li>5. Perbankan</li> <li>6. SKPD Teknis terkait pertanian</li> <li>7. DPRD (Komisi II)</li> <li>8. Pedagang Pengusaha</li> <li>9. BSP WASIAT</li> <li>10. Bagian Hukum</li> <li>11. Satpol PP</li> <li>12. Diskoperindag</li> </ol>
a) Pihak mana saja yang memiliki pengaruh lebih besar atas regulasi yang disusun?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SKPD Teknis terkait pertanian</li> <li>2. Komisi II DPRD</li> </ol>
b) Pihak mana saja yang memiliki pengetahuan yang luas atas permasalahan yang sedang dibahas?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staff Ahli Bupati Bidang Pertanian</li> <li>2. KTNA</li> <li>3. Perguruan Tinggi/Akademisi</li> <li>4. Pegiat/LSM</li> </ol>
2) Identifikasi pihak mana sajakah yang mendukung dan pihak yang kurang mendukung? Apa alasannya?	<p><b>Pihak Yang Mendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petani</li> <li>2. KTNA</li> <li>3. Penyuluh</li> <li>4. KPPK</li> <li>5. Perbankan</li> <li>6. SKPD Teknis terkait pertanian</li> <li>7. DPRD (Komisi II)</li> <li>8. BSP WASIAT</li> <li>9. Bagian Hukum</li> <li>10. Satpol PP</li> <li>11. Diskoperindag</li> <li>12. Bappeda</li> </ol>



## KONSULTASI PUBLIK

Check List Question	Perda Kelompok Tani
	<p><b>Pihak Yang Menghambat:</b> Pedagang Pengepul</p> <p><b>Alasan:</b> Kehilangan pendapatan</p>
3) Bagaimana mekanisme yang tepat dalam menyelenggarakan konsultasi publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publikasi draft regulasi dengan permohonan untuk memberikan draft tersebut.</li> <li>• Pertemuan/konsultasi dengan pengamat ahli, pihak yang akan terkena dampak regulasi, dan masyarakat umum. Pertemuan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pertemuan kecil (informal atau formal), pertemuan besar (seminar atau simposium).</li> </ul>
4) Bagaimana penggunaan atas hasil konsultasi publik	
a) Apakah ada publikasi atas hasil konsultasi publik	Publikasi atas hasil konsultasi publik dibuat dalam bentuk "RIA Statement" baik berupa hardcopy maupun dipublikasikan melalui media cetak, disebarakan dalam diskusi public secara langsung maupun di media elektronik.
b) Apakah hasil konsultasi publik dapat merubah isi regulasi atau permasalahan yang sedang dibahas	Dokumen ini sebagai dokumen yang fleksibel yang selalu dapat diubah seiring dengan perkembangan informasi yang diperoleh dari partisipan/stakeholder terkait.

*Catatan: Hasil Lokalatih Penguatan Kapasitas Legislasi, 12-14 September 2013*

### III.4.6. Strategi Implementasi

Regulasi sebaik apapun tidak ada gunanya jika tidak dapat diterapkan. Tingkat keberhasilan penerapan akan mempengaruhi seberapa besar manfaat yang diperkirakan akan dapat terealisasi. Ini semua bergantung pada tingkat kepatuhan. Dalam analisis RIA, perkiraan persentase tingkat kepatuhan ini harus diperhitungkan. Bisa saja alternatif dengan tingkat manfaat besar akan terkalahkan oleh alternatif dengan tingkat manfaat kecil, karena perbedaan tingkat kepatuhan.

## SELALU INGAT !!

Keberhasilan implementasi juga bergantung pada sumber daya yang digunakan untuk mendukung penerapan regulasi tersebut

### III.4.6.1. Fokus Perhatian dalam Strategi Implementasi

Karena proses implementasi tidak semudah yang diasumsikan, maka perlu dirumuskan strategi yang perlu diikuti dalam implementasi alternatif terpilih. Faktor-faktor yang harus dijadikan fokus perhatian dalam perumusan strategi implementasi adalah:

- Mekanisme penerapan yang dapat digunakan untuk alternatif terpilih berdasarkan pada:
  - Analisis kemungkinan alasan-alasan untuk ketidakpatuhan;
  - *Review* daftar berbagai kemungkinan mekanisme penerapan untuk masing-masing alternatif regulasi maupun non-regulasi.
- Efektivitas biaya masing-masing alternatif mekanisme penerapan yang didasarkan pada:
  - Tingkat kepatuhan yang dapat diharapkan untuk masing-masing alternatif mekanisme;
  - Biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk masing-masing alternatif mekanisme;
  - Biaya yang harus ditanggung dunia usaha dan konsumen untuk masing-masing mekanisme.

### III.4.6.2. Jenis-jenis strategi implementasi

Beberapa jenis mekanisme yang dapat digunakan untuk memaksa atau mendorong kelompok target mematuhi regulasi yang akan diterapkan antara lain:

- ☞ Peringatan secara verbal ataupun tertulis;
- ☞ Tilang;
- ☞ Sanksi administrasi;
- ☞ Peningkatan beban regulasi (seperti tuntutan pembuatan laporan yang lebih ketat, inspeksi yang lebih intensif, atau pengenaan tambahan biaya untuk tambahan pemeriksaan);
- ☞ Penalti keuangan;
- ☞ Pengumuman kepada publik pihak-pihak yang tidak patuh;
- ☞ Sanksi dalam hal perijinan (seperti skorsing, pencabutan, dan tidak dapat memperbaharui ijin);
- ☞ Tuntutan pidana.

Selain sanksi dan penalti yang disebutkan di atas, strategi untuk meningkatkan derajat kepatuhan harus juga mempertimbangkan kemungkinan penggunaan imbalan dan insentif untuk kepatuhan secara sukarela. Pilihan insentif yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- ☞ Pengurangan jumlah pemeriksaan;
- ☞ Penawaran pemotongan terhadap penalti;

- ☞ Penyederhanaan terhadap perijinan bagi perusahaan yang mempunyai catatan baik dalam memenuhi berbagai ketentuan;
- ☞ Pemberian penghargaan berdasarkan tingginya tingkat kepatuhan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas proses sosialisasi suatu regulasi menjadi sangat penting untuk direncanakan di dalam strategi implementasi. Untuk hal-hal yang sangat teknis, waktu yang lebih panjang untuk mensosialisasikan pertimbangan-pertimbangan tersebut kepada kelompok target. Jika diperlukan proses untuk suatu regulasi bisa diterapkan secara penuh, maka masa transisi ini harus dimasukkan dan diantisipasi dalam strategi.

### Contoh Strategi Implementasi

Di Majene, agar implementasi pilihan alternative dapat berjalan dengan baik maka dirumuskan beberapa hal terkait strategi implementasi yang tercantum dalam tabel ringkas dibawah ini:

STRATEGI IMPLEMENTASI	
1. Apakah mekanisme yang digunakan untuk alternatif tindakan terpilih?	
a) Regulasi atau non regulasi?	Regulasi dalam bentuk peraturan daerah (perda)
b) Bagaimana analisis persepsi tingkat kepatuhan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para pihak (<i>stakeholders</i>) diyakini patuh terhadap kebijakan yang dibuat, karena kebijakan ini berasal dari aspirasi stakeholder dari bawah (<i>Bottom Up</i>).</li> <li>• Adanya kesadaran bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para petani kakao di Majene.</li> </ul>
c) Bagaimana analisis biaya manfaat?	Berdasarkan analisis biaya dan manfaat, kebijakan ini dapat disimpulkan lebih besar manfaat daripada biaya.
2. Apakah jenis sanksi yang digunakan untuk mendorong kepatuhan?	Untuk mendorong tingkat kepatuhan terhadap aturan, sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administratif. Bahkan, jika diperlukan, sanksi pidana juga bisa dikenakan bagi para pelanggar.
3. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan untuk mendorong kepatuhan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultasi Publik (FGD atau pertemuan informal) kepada para pihak terkait.</li> <li>• Pemaparan hasil/hearing/audiensi dengan Bupati atau DPRD.</li> <li>• Publikasi dilakukan melalui media cetak maupun elektronik.</li> </ul>
a) Bagaimana efektifitas sosialisasi yang dilakukan?	Efektif
b) Bagaimana intensitas sosialisasi yang dilakukan?	7 kali

## IV. PERATURAN DAERAH RAMAH INVESTASI

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, selain mekanisme perencanaan yang baik, sebuah kebijakan juga harus memiliki substansi yang baik. Untuk menghasilkan suatu perda yang ramah investasi maka secara substansi harus memenuhi dua kriteria, yakni Kriteria Umum dan Kriteria Khusus perda yang ramah investasi.

### A. Kriteria umum

Yang dimaksud dengan kriteria umum adalah kriteria-kriteria yang harus ada dalam semua perda yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aktivitas investasi ataupun usaha di daerah. Beberapa kriteria yang termasuk dalam kriteria umum ini adalah:

1. Kesesuaian dengan kebutuhan
  - » Mengatur hanya sesuai kebutuhan yang akan diatur sehingga perda yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran.
  - » Dapat dilaksanakan, dalam artian, perda tersebut harus memperhitungkan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
  - » Bermanfaat dan berdaya guna, hal ini dikarenakan perda dibuat karena kondisi dimasyarakat membutuhkan pengaturan. Tidak hanya itu perda juga diharapkan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Substansi/Penulisan yang baik
  - » Penulisan substansi secara baik, penggunaan bahasa yang sederhana dan tidak menimbulkan multi tafsir. Memiliki kejelasan rumusan dalam hal bahasa hukum, terminologi, dan mudah dimengerti.
  - » Relevansi acuan yuridis dan mengacu pada peraturan atau undang-undang yang mengatur obyek yang sama
  - » Kemutakhiran (*up-to-date*) acuan yuridis, dalam artian harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang paling mutakhir
  - » Kelengkapan yuridis, dalam artian bahwa perda harus memiliki kelengkapan secara material mengenai apa saja yang harus diatur dalam sebuah perda (konten minimal). Selain itu harus ada kejelasan obyek maupun subyek yang diatur.
  - » Konsistensi antar pasal dan ketepatan muatan materi di dalam
3. Keadilan
  - » Menjamin semua pihak sama dimuka hukum. Tidak boleh ada aturan yang membedakan perlakuan terhadap subyek perda apalagi bersifat suku, ras, agama dan golongan.
  - » Mencantumkan secara jelas hak-hak dan kewajiban subjek perda sehingga ada kepastian hukumnya. Muatan yang terkandung dalam perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
  - » Memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya.
4. Keterbukaan
  - » Perda membuka partisipasi masyarakat/*stakeholder* tidak hanya dalam pembuatan namun pada saat implementasi.

- » Perda harus mudah diakses masyarakat untuk memperoleh informasi penting dalam pengambilan keputusan
  - » Tidak menghalangi akses masyarakat untuk mengakses sumber daya ekonomi
5. Persaingan yang sehat
    - » Membuka kesempatan bagi semua lapisan masyarakat, menghindarkan dari praktik persaingan tidak sehat, dan memperhatikan perlindungan terhadap konsumen
  6. Insentif untuk dunia usaha
    - » Memuat insentif kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya di daerah (keringanan pajak dan atau retribusi, kemudahan perijinan, permodalan atau insentif sarana dan prasarana)
  7. Efisiensi
    - » Dapat memberikan setidaknya 3 efisiensi bagi investor maupun Pemda, yaitu: Efisiensi biaya, SDM dan efisiensi birokrasi
  8. Manajemen konflik yang baik
    - » Adanya mekanisme penyelesaian sengketa antar pihak secara jelas, cepat, mudah mengikat dan terukur.

## B. Kriteria Khusus

Adapun kriteria khusus yang dimaksud adalah kriteria-kriteria yang dikhususkan untuk jenis-jenis perda yang berhubungan dengan ekonomi. Dalam hal ini terdapat empat jenis perda ekonomi seperti dibawah ini:

PERDA EKONOMI			
<p><b>Perda Pungutan (pajak &amp; retribusi) dan perijinan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muatan perda pungutan, jenis-jenis pungutan, dan besaran tarif disesuaikan dengan ketentuan UU No.28/2009.</li> <li>2. Muatan perda perizinan dan ketentuan mengenai perizinan disesuaikan dengan ketentuan UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal.</li> <li>3. Memuat insentif kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya di daerah (keringanan pajak dan atau retribusi, kemudahan perijinan, permodalan atau insentif sarana dan prasarana)</li> </ol>	<p><b>Perda Perencanaan Daerah (RTRW, RPJMD, dll)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan RPJMD mengacu pada RPJMN dengan memperhatikan faktor berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi daerah</li> <li>• Tingkat eksosbud masyarakat</li> <li>• Daya dukung lingkungan</li> </ul> </li> <li>2. Perda RTRW berisikan rencana rencana pengaturan tata ruang suatu daerah dengan mengacu pada UU No. 26/2007</li> </ol>	<p><b>Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memuat pengesahan APBD yang akan digunakan untuk tahun anggaran berjalan.</li> <li>2. Muatan perda APBD mengacu pada Permendagri No. 27/2013 dan PP 71/2010 (PSAP).</li> <li>3. Perda APBD harus efisien, berbasis kinerja dan mendorong pertumbuhan di daerah tsb.</li> </ol>	<p><b>Perda SOTK</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muatan materi yang diatur terkait besaran dan ukuran SKPD di daerah.</li> <li>2. Perda SOTK didasarkan pada PP No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.</li> </ol>

### CONTOH-CONTOH PERDA RAMAH INVESTASI:

1. Perda insentif investasi di Kota Balikpapan:
  - memberikan insentif kpd investor berdasar kawasan tempat usaha;
  - Investor di wilayah KIK diberikan insentif berupa keringanan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah (25-75%), dan 5-25% bagi investor yang berusaha di luar KIK.
  - kemudahan terhadap semua perijinan berupa pemberian prioritas penerbitan semua ijin.
2. Perda Perlindungan Investasi di Kab. Barru:
  - Penyediaan fasilitas: bantuan proses pelayanan perizinan, fasilitas, dan persiapan lahan sesuai rencana peruntukannya;
  - Kemudahan dan keringanan pajak/retribusi untuk jangka waktu tertentu;
  - Ketenagakerjaan: Pemda wajib memfasilitasi penyediaan kebutuhan tenaga kerja dan memediasi perselisihan;
  - Kepastian berusaha: perlindungan hak-hak keperdataan investor dan jaminan

Untuk melaksanakan perda ramah investasi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Efektifitas Perda, pelaksanaan perda harus efektif (tepat sasaran) dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan bukan malah menambah masalah baru.
- b. Kesesuaian dengan pelaksanaan di lapangan, pelaksanaan perda ramah investasi harus konsisten dan konsekuen dengan apa yang sudah diatur di dalam perda tersebut, dengan pelaksanaan di lapangan.
- c. Tingkat kepatuhan masyarakat, pelaksanaan perda ramah investasi harus dapat mengatur investor dan masyarakat dalam mengurangi atau menghilangkan pelanggaran yang terjadi dan juga mengurangi jenis-jenis pelanggarannya.

Beberapa dampak yang timbul dari penerapan perda ramah investasi adalah sebagai berikut:

- a. Dampak sosial, berupa terjadinya keteraturan dalam masyarakat, terciptanya lapangan kerja yang luas, penurunan tingkat kemiskinan dan lain sebagainya.
- b. Dampak ekonomi, berupa peningkatan ekonomi, peningkatan investasi, tumbuhnya perekonomian dan lain sebagainya.
- c. Dampak hukum, berupa adanya penurunan angka permasalahan sengketa, penurunan angka kejahatan dan lain sebagainya.





FORDFOUNDATION

*Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah  
Regional Autonomy Watch*

Gd. Permata Kuningan Lt.10  
Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980  
Phone: +62 21 8378 0642/53, Fax.: +62 21 8378 0643